

khususnya pelaku politik tertentu.

Contoh lain, kiprah pelajar dan mahasiswa dalam politik praktis dilarang. Namun politisasi atas diri mereka diperbolehkan hanya demi kepentingan politik tertentu secara sem-

pit dan berjangka pendek. Di masa datang, tampaknya kebebasan akademik kalangan pada kalangan akademis harus benar-benar dibuka seperti halnya kebebasan para politisi untuk menampilkan kiprahnya di masyarakat ***

PT Unggulan Bermoral Pesantren

SUARA MERDEKA

SENIN, 3 MARET 1997

Tahun - nomor : XLVIII/21
Halaman - kolom : VII/1-5

Oleh A. Khudori Soleh

TERUS terang, lembaga pendidikan tinggi kita saat ini belum mampu memenuhi tuntutan pendidikan nasional secara utuh sebagaimana yang diamanatkan GBHN: terciptanya kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa dan berilmu pengetahuan tinggi.

Disamping, juga demi memenuhi keinginan orang tua wali murid, agar anak-anaknya mampu menguasai iptek dan sekaligus mempunyai modal keimanan dan ketakwaan yang kuat kepada Allah.

Padahal, masyarakat kita sangat membutuhkan adanya lembaga pendidikan ideal seperti itu. Yaitu lembaga pendidikan yang mampu memberikan ilmu pengetahuan dan teknologi maju (Iptek) sekaligus menumbuhkan keimanan dan ketakwaan.

Hal ini bisa dibuktikan dengan membludaknya calon mahasiswa yang ingin masuk IAIN ketika masih terbuka program tradisi: matematika dan bahasa Inggris. Di situ mereka bisa mendapat dua keuntungan: menguasai ilmu-ilmu umum (matematika dan bahasa Inggris) dan sekaligus ilmu-ilmu agama.

Kondisi Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi kita saat ini, telah banyak memberikan andil bagi pembangunan SDM nasional. Amat banyak sarjana atau ilmuwan dilahirkan dari sana. Akan tetapi, bila dilihat dari segi kualitas keilmuan dan pembinaan moralnya, masih sangat jauh ketinggalan dan kita patut prihatin.

Untuk soal kualitas, kiranya bisa dilihat dari segi relevansinya dengan dunia kerja. Pada tahun 1989, angka partisipasi pendidikan tinggi kita 2,3%, sedang Malaysia telah mencapai 5,1% dan Taiwan 10,1%.

Tahun 1991 ada kenaikan, menjadi 10%. Namun, itu juga belum bisa dibanggakan. Kita masih tetap jauh ketinggalan. Angka itu telah dicapai Korea pada tahun 1975.

Sebagai perbandingan, angka partisipasi pendidikan tinggi 38% dicapai Filipina tahun 1985, Thailand 20% tahun 1985, Singapura 12% tahun 1983.

Rendahnya partisipasi pendidikan tinggi kita terhadap dunia kerja ini kemudian memunculkan masalah baru: pengangguran yang semakin tahun semakin meningkat.

Dalam hasil suatu studi proyeksi yang diadakan ketika mempersiapkan Repelita V yang lalu disimpulkan apabila dunia pendidikan kita tetap berjalan sebagaimana yang ada sekarang, akhir Repelita V akan terdapat surplus tamatan pendidikan tinggi sebanyak 614,2 ribu, seterusnya satu juta lebih pada akhir Repelita VI dan 1,7 pada akhir Repelita VII (Tilaar, 1992).

Bahkan, bila dilihat dari poros pendidikan dasar - pendidikan tinggi, ada kecenderungan semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin tinggi pula peluangnya untuk menjadi penganggur.

Kelebihan lulusan pendidikan tinggi ini, cenderung semakin berlipat-lipat dari Repelita ke Repelita.

Tentang lemahnya pembinaan moral keagamaan di perguruan tinggi, dibuktikan dengan banyaknya penyelewengan, kolusi, korupsi — yang menurut Sumitro sampai mencapai 30% dari dana pembangunan — dilakukan oleh "orang-orang besar" yang notabene pernah dididik di lembaga perguruan tinggi.

Juga bisa dilihat dari maraknya budaya sontek-menyontek ketika

ulangan kalangan mahasiswa, menjiplak skripsi, jual-beli nilai atau yang lain yang tidak sesuai dengan moral akademis dan moral agama.

Dari situ, apa yang dinamakan nilai-nilai keikhlasan dalam menuntut ilmu akhirnya juga menjadi terasa hambar.

Kegiatan kuliah tidak lagi didasarkan pada niat yang murni untuk meningkatkan kualitas dan potensi diri sebagai aktualisasi ibadah, tapi bergeser ke arah tujuan-tujuan lain yang lebih pragmatis dan duniawi.

Akibatnya, mereka masuk kuliah bukan untuk mencari ilmu, tetapi hanya mengejar nilai formalitas: angka-angka atau selembur ijazah, yang cara mendapatkannya bisa dengan jalan pintas sebagaimana yang banyak terjadi dalam kasus pendidikan kita.

Lembaga Pesantren

Dunia pesantren yang dinilai banyak kalangan sebagai lembaga pendidikan nomor tiga — setelah lembaga pendidikan umum dan agama, dari MIN sampai IAIN — ternyata mempunyai banyak kelebihan dalam bidang pembentukan moral, yang itu justru sangat dibutuhkan dalam masa-masa kegersangan rohani seperti saat ini.

Di pondok pesantren, nilai-nilai keikhlasan — yang di dunia perguruan tinggi telah banyak bergeser ke arah materialistik — justru tumbuh dengan subur. Dalam pandangan mereka, belajar-mengajar, bukanlah semata-mata demi mengejar prestasi duniawi, tetapi merupakan salah satu dari realisasi ibadah.

Disamping itu, pesantren juga punya nilai lebih dalam soal kemandirian dalam berwirausaha. Para santri punya gairah yang kuat untuk mandiri, sehingga, dalam soal pengangguran yang telah mencapai ambang mengkhawatirkan dewasa ini, justru para santri tidak ada yang menganggur.

Mereka mau bekerja apa saja, tanpa pilih-pilih, asal halal.

Dengan modal semangatnya tersebut, kita lihat, akhirnya banyak santri yang tidak hanya mampu menciptakan lapangan kerja yang baik untuk diri dan keluarganya, tetapi juga masyarakat lain.

Penyebab Mutu Rendah

Rendahnya mutu perguruan tinggi kita sehingga selalu tertinggal oleh perguruan-perguruan tinggi negara-negara jiran, pada dasarnya karena minimnya dana pendidikan yang diberikan pemerintah.

Tahun 1994/1995, dunia pendidikan di Indonesia hanya mendapat jatah 3,9% dari APBN (JP, 7/01/94) dan pada tahun ini bahkan lebih minim: 4,3%. Sedang di Malaysia, Korea Selatan, dan Filipina, lembaga pendidikan mendapat alokasi dana sebesar 30% dari APBN (Studwick, 1991).

Kondisi seperti ini tentu tidak bisa dibiarkan. Apalagi dalam memasuki era global dan pasar bebas nanti, dimana persaingan semakin tajam dan kualitas produk; termasuk produk perguruan tinggi semakin menjadi tuntutan, maka mau tidak mau lembaga perguruan tinggi kita juga harus mau dan mampu bersaing dengan lembaga-lembaga di luar negeri, minimal tidak kalah dengan lembaga pendidikan yang ada di negara-negara tetangga.

Tentang penyebab lemahnya pembentukan dan pembinaan moral (keagamaan) di perguruan tinggi, rupanya, adalah karena kurikulum pen-

didikan kita kurang seimbang, antara muatan agama dan pengetahuan umumnya.

Di Perguruan tinggi, kita lihat, untuk mencapai sarjana S1, seseorang harus menempuh sekitar 160 SKS, dan hanya 2 SKS yang berupa pendidikan atau pengetahuan keagamaan.

Itu pun sudah meliputi pengetahuan agama yang amat luas; aqidah, syariah dan ahlak.

Dalam perbandingan seperti itu, sudah barang tentu akan sulit bagi perguruan tinggi untuk mampu menelurkan sarjana yang utuh sebagaimana diamanatkan GBHN. Bila kita tengok kembali tujuan pendidikan nasional tersebut, kurikulum yang ada di perguruan tinggi saat ini, juga pada lembaga-lembaga di bawahnya, berarti patut ditinjau kembali, khususnya kurikulum lokalnya.

Memang ada perguruan tinggi yang memberikan tambahan pendidikan keagamaan sendiri secara khusus, seperti Universitas Muhammadiyah atau perguruan tinggi lain yang dikelola Al-Maarif, seperti Universitas Islam Malang (Unisma) atau yang lain.

Di sana pendidikan agama mencapai 8 SKS. Namun, disini kita juga masih patut bertanya, apakah itu sudah mencukupi? Mengingat, dalam perguruan tinggi-perguruan tinggi tersebut kurang adanya perfeksian soal pengamalan keagamaan pada waktu-waktu yang lain.

Bukankah banyak juga sarjana yang mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang keagamaan, dan mereka dahulu dididik di perguruan tinggi umum?

Secara kasuistis, memang tidak dipungkiri adanya kenyataan seperti itu. Saat ini ada —walau tidak banyak— tokoh-tokoh yang mempunyai kemampuan iptek tinggi sekaligus pengetahuan agama yang mendalam dan mereka pada mulanya menempuh pendidikan di perguruan tinggi (bukan di pesantren).

Banyak contoh guru besar atau profesor serta doktor di berbagai bidang keilmuan yang ternyata memiliki kedalaman ilmu agama. Sehingga lantas sering terjadi ada profesor yang sekaligus seorang ustad atau ustadah. Banyak ilmuwan yang tampil sebagai penceramah agama di berbagai tempat.

Namun, hal itu bukan berarti materi pendidikan agama di perguruan tinggi telah mampu mengemblem seorang mahasiswa menjadi ahli dan bermoral agama yang kuat. Sebab, jika ada guru besar yang juga seorang ustad, ternyata hal itu karena adanya gemblengan agama yang demikian intensif dalam keluarga atau lingkungannya.

Unggulan

Untuk mengatasi berbagai kelemahan dan keteringgalan pen-

didikan kita dibanding pendidikan di negara-negara tetangga, perlu adanya perguruan tinggi khusus yang mampu membekali sains dan teknologi tinggi kepada para mahasiswanya, disamping penanaman moral keagamaan yang mendalam.

Atau sebuah perguruan tinggi unggulan yang bernaftakan moral pesantren (PTU-MP).

Selama ini —walau mutunya masih kalah bersaing, bahkan teringgal jauh dari lembaga-lembaga pendidikan yang ada di luar negeri— dunia perguruan tinggi dikenal memiliki keunggulan dalam bidang penguasaan iptek.

Sedang pondok pesantren, sebagaimana diuraikan, memiliki keunggulan bidang pembinaan pribadi yang beriman dan bertakwa.

Disamping itu, juga dalam sikap kemandirian dan keikhlasan yang demikian intensif dalam menuntut dan mengkaji ilmu, perguruan tinggi unggulan yang diharapkan mampu memenuhi tuntutan GBHN tersebut adalah sebuah perguruan tinggi yang menggabungkan kelebihan-kelebihan perguruan tinggi dengan kelebihan pesantren, dengan sistem dan pengelolaan khusus.

Namun demikian, yang perlu diperhatikan, PTU ini tidak bermiat menelurkan sarjana yang menguasai pengetahuan umum sekaligus agama. Tetapi sarjana yang menguasai iptek dan berperilaku agamis.

Soal perilaku dan sikapnya inilah yang dipentingkan. Bukan sekadar penguasaan terhadap ilmu-ilmu agama. Karena itu dalam kurikulum PTU itu nantinya, tidak semata-mata dengan menambahkan materi-materi agama dalam jumlah besar, dengan perbandingan 50-50 misalnya. Tidak.

Materi agama bahkan hanya sekitar 30 SKS saja. 160 SKS lainnya tetap dengan ilmu-ilmu pengetahuan umum.

Lalu bagaimana dengan model kurikulum seperti itu PTU mampu membentuk sarjana yang berperilaku agamis? Perilaku manusia sangat dipengaruhi lingkungannya. Karena itu, untuk menciptakan sarjana yang punya kepribadian santri, maka para mahasiswa PTU ini akan dididik dalam lingkungan "pesantren".

Kasarnya, mereka diasramakan. Sehingga, dengan demikian, pembinaan mahasiswa dalam berbagai aspek kehidupan dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin. Begitu pula aktivitas ekstra kurikulumnya.

Namun, model asrama yang dimaksudkan di sini bukanlah sekadar asrama sebagaimana yang sering kita jumpai di kota-kota, atau di instansi-instansi tertentu. Sistem asrama atau pemondokan bagi segenap mahasiswa PTU harus diupayakan sedemikian rupa sehingga mampu meniru, atau mirip dengan "dimensi po-

sitif" kondisi pesantren: baik dari segi kegiatan ataupun pembinaannya. Misalnya dalam soal kegiatan salat jamaah sehari-harinya, tahajut atau yang lain.

Sedemikian, sehingga dari sana bisa tumbuh rasa keikhlasan, hubungan yang harmonis antara santri (mahasiswa) dengan kiai (dosen), antara mahasiswa dengan mahasiswa, juga kemandirian.

Dengan format seperti itu, PTU akan tampil dengan sosok yang baru: lembaga pendidikan masa depan, yang relatif lebih komplet dibanding lembaga pendidikan lainnya.

Bila gagasan ini bisa direalisasikan, tujuan pembangunan nasional: menciptakan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, kiranya akan cepat bisa terwujud.

Biaya Investor

Untuk mewujudkan PTU, jelas membutuhkan dana yang sangat besar. Untuk itu, pengelolannya ini diserahkan kepada investor; bisa dari dalam negeri maupun luar negeri (investor asing).

Gagasan untuk menyerahkan pengelolaan PTU kepada investor (asing) ini didasarkan atas beberapa alasan. Pertama, saat ini kita tidak mungkin mampu menaikkan anggaran dana pendidikan sampai minimal 30% dari APBN, untuk mengejar ketertinggalannya dengan negara-negara tetangga.

Padahal, lembaga pendidikan kita sangat jauh ketinggalan dibanding mereka, karena memang tidak adanya dana yang memadai. Kita dituntut untuk segera mengejar keter-

tinggalan tersebut, disamping pembekalan keimanan, bila tetap ingin eksis dalam era global nanti.

Kedua, untuk menghemat biaya dan menjaga moral plus nasionalisme.

Bila para pemuda kita sekolah di PTU (dalam negeri), karena mutunya yang tidak kalah dengan yang di luar, maka berarti bisa menghemat biaya pendidikan bila dibanding dengan sekolah disana (di luar).

Minimal biaya hidup lebih ringan, disamping rasa nasionalismenya tidak akan luntur dan pembinaan moralnya terjamin.

Ketiga, bisa untuk menarik devisa. Bila PTU ini bermutu karena adanya dana yang besar dari investor, sehingga akhirnya mampu membuka kelas-kelas internasional, ini berarti memasukkan devisa bagi negara.

Australia secara sadar "menjual" jasa pendidikannya keluar negeri sehingga ribuan mahasiswa luar negeri datang ke sana. Australia meruh devisa ketiga besarnya dari sektor industri jasa pendidikan.

Keempat, bisa merangsang perkembangan pendidikan di tanah air. Dengan adanya peran investor sehingga PTU memiliki mutu dan peralatan yang lebih lengkap disini, maka mau tak mau, hal itu akan merangsang lembaga-lembaga pendidikan yang ada untuk lebih meningkatkan kualitasnya, bila mereka tetap ingin eksis. (18)

—A. Khudori Soleh, alumnus IAIN Malang.

